

Judul : UU Energi terbarukan mendesak
Tanggal : Jumat, 12 Juli 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 12

UU Energi Terbarukan Mendesak

JAKARTA - Pelaku industri yang tergabung dalam Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendorong lahirnya Undang-Undang (UU) Energi Baru Terbarukan (EBT). Keberadaan UU EBT diharapkan mampu menjamin kepastian hukum berinvestasi di Indonesia.

Saat ini DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). "METI mendorong lahirnya UU EBT. Kepastian hukum harus segera diwujudkan supaya pengembangannya tidak berjalan lambat. Itulah perlunya RUU EBT disusun dan disahkan sebagai kepastian hukum yang perlu ditempatkan pada posisi lebih tinggi," ujar Ketua Umum METI Surya Darma di sela *launching* pameran Indi EBTKE CoNex 2019 di Jakarta kemarin.

Menurut dia, METI telah dilibatkan dalam penyusunan RUU EBT yang diinisiasi DPR. Terdapat sejumlah usulan kerangka masalah yang diajukan kepada DPR dalam penyusunan RUU EBT.

Di antaranya kemudahan dan percepatan perizinan untuk pembangkit listrik dan fasilitas bahan bakar berbasis energi terbarukan. Selain itu, juga harga energi yang menarik sesuai harga keekonomian.

Dalam RUU tersebut juga mengatur insentif harga energi untuk listrik perdesaan berbasis energi terbarukan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. "Pengurangan pajak penghasilan badan usaha untuk jangka waktu tertentu (*tax holiday*) juga diatur dalam RUU ini," katanya.

Pelaku industri, kata Surya Darma, juga meminta harga energi terbarukan sesuai dengan keekonomian dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemerintah diminta menyediakan subsidi untuk masyarakat,

PLN, dan Pertamina, jika harga keekonomian di atas daya beli.

METI juga memberikan masukan supaya penetapan harga listrik yang dilakukan melalui badan pengelolaan EBT. "Badan pengelola ini juga nantinya bisa menerbitkan sertifikat, mengatur penggunaan EBT, dan lainnya. Sementara besaran formula harga listrik dapat menggunakan harga patokan pembelian listrik (*feed in tariff*) oleh PLN, negosiasi antara PLN dan pengembang serta berdasarkan harga lelang dasar," kata dia.

Terkait formula harga listrik tersebut dapat dihitung berdasarkan besaran kapasitas pembangkit dan teknologi. Pasalnya, infrastruktur pembangkit EBT mempunyai jenis kapasitas daya dan teknologi beragam. "Itu sudah kami usulkan dalam penyusunan RUU EBT. Kami memandang dengan UU EBT nantinya akan memiliki kepastian hukum," kata dia.

Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisyam mengatakan, lahirnya UU EBT nantinya akan menjadi langkah maju untuk segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Untuk saat ini materi RUU EBT sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) dan diharapkan sudah mulai dibahas anggota DPR baru pada Oktober nanti.

Pihaknya menargetkan RUU EBT dapat sidangkan dalam kurun waktu satu tahun.

"Sebelum UU EBT disahkan, Kementerian ESDM dapat terus meningkatkan program-program guna mendorong peningkatan pengembangan EBT di dalam negeri," jelas dia.

Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN Sripeni Inten Cahyani mendukung penyusunan RUU EBT. Pihaknya berharap aturan yang dibuat diharapkan mampu memberikan langkah positif bagi pengembangan EBT di dalam negeri serta mampu mengakomodasi seluruh pihak termasuk harga dan tarif listriknya. "Tapi yang jelas nanti kita pelajari dulu isinya seperti apa? Namun tentunya kami mendukung langkah positif pemerintah dan DPR terkait RUU EBT," kata dia.

Perbaikan Kebijakan

Indonesia telah menetapkan target bauran energi primer sebesar 23% dari energi baru dan terbarukan pada 2025. Namun, realisasi dari target tersebut diperkirakan tidak bisa tercapai apabila pemerintah tidak memperbaiki kebijakan di sektor energi terbarukan.

Laporan perusahaan konsultan manajemen global AT Kearney, dalam kemitraannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan perbaikan kebijakan diperlukan untuk mempercepat transisi energi negara sehingga dapat mencapai target energi terbarukan pada 2025 dan perubahan iklim pada 2030.

Alessandro Gazzini, mitra AT Kearney memaparkan, energi terbarukan hanya menyumbang 12% dari total listrik yang dihasilkan pada 2018. Berdasarkan proyek-proyek yang saat ini sedang dalam pengawasan menunjukkan penggunaan energi terbarukan kemungkinan akan tetap sebesar 12% pada 2025 jauh dari target 23%.

● nanang wijayanto/
oktiani endarwati